

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di dalam suatu negara dapat berjalan dengan baik apabila terdapat unsur yang dapat mengatur atau mengontrolnya, terutama dari segi perekonomian. Prinsip pengelolaan perekonomian yang baik, meliputi transparansi keuangan, akuntabilitas, partisipasi, serta keadilan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat jelas memiliki kewenangan dalam mengelola perekonomian dan tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam mengatur perekonomiannya sendiri. Kewenangan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah dapat disebut dengan desentralisasi fiskal (Kementerian Keuangan, 2015). Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dapat diwujudkan dengan adanya pemerintah daerah mampu memutuskan suatu kebijakan tanpa campur tangan dari pemerintah pusat, tetapi tidak selalu berjalan dengan lancar, karena terdapat beberapa oknum yang dapat menyalahgunakan wewenang.

Pendapat yang dikemukakan Sidik (2002) menyebutkan bahwa desentralisasi ialah perangkat yang digunakan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat dan mewujudkan pengambilan keputusan publik agar menjadi demokratis. Agrawal dan Ribot (2000) dari berbagai sumber berpendapat bahwa desentralisasi merupakan aktivitas dari pemerintah pusat yang secara formal memberikan wewenang (mencakup hal administrasi politik dan hierarki wilayah) terhadap institusi di tingkat yang lebih rendah. Negara yang terdesentralisasi tidak hanya terjadi pada negara maju, melainkan negara berkembang, seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin (Bardhan, 2002). Desentralisasi yang telah diterapkan di seluruh dunia telah dipertimbangkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah nasional, organisasi nasional, serta

masyarakat sipil agar kinerja pemerintah dapat diawasi dan diketahui oleh masyarakat sehingga meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi (Rodríguez-Pose dan Ezcurra, 2009; Pina-Sánchez, 2014).

Desentralisasi pada kenyataannya menimbulkan berbagai masalah bagi masing-masing negara. Gagasan utama dibalik terjadinya desentralisasi ialah pemerintah pusat menduga bahwa semakin banyak perilaku kecurangan di dalam sistem pemerintahan daerah yang berlaku sehingga desentralisasi dibentuk dengan tujuan dapat meminimalisir tingkat korupsi di negara yang terkait. Desentralisasi dianggap sebagai peran penting dari strategi anti-korupsi (Fjeldstad, 2004: 1; Lessmann dan Markwardt 2010: 642).

Beberapa literatur akademik yang telah membuktikan bahwa tingkat korupsi lebih rendah di negara-negara yang terdesentralisasi (de Mello dan Barenstein, 2001; Fisman dan Gatti, 2002; Arikan, 2004; Freille *et al.*, 2007; Altunbaş dan Thornton, 2012). Penelitian lain menemukan bahwa korupsi meningkat di suatu negara justru dengan lebih banyak desentralisasi (Treisman, 2000; Gerring dan Thacker, 2004; Fan *et al.*, 2009).

Desentralisasi fiskal yang dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang maupun tanggung jawab dari sisi keuangan yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat mengurangi tingkat korupsi di suatu negara apabila dibantu dengan variabel kebebasan pers, seperti pada penelitian yang telah dilakukan Arikan. Arikan (2000) menjelaskan bahwa desentralisasi dapat mengurangi tingkat korupsi di daerah tertentu dengan memasukkan variabel tingkat pendidikan, kebebasan pers, dan transparansi ekonomi dengan hasil penelitian variabel-variabel tersebut berdampak positif terhadap tingkat korupsi.

Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan kekuasaan yang resmi atau kedudukan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Kasus tindak korupsi menjadi fenomena yang umum dan luas; terjadi di berbagai negara maju maupun berkembang. Korupsi tidak hanya menunjukkan kerendahan moral, akan tetapi menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pembangunan ekonomi dan sosial

(Bardhan, 1997). Bentuk dan instrumen tindak pidana korupsi terdiri dari berbagai macam, salah satunya akibat dari adanya desentralisasi fiskal. Hal ini dianggap mengubah maksud dan tujuan awal dari desentralisasi. Daerah yang terdesentralisasi diharapkan akan menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien. Menurut Maulani (2010), tindak korupsi banyak terjadi di daerah otonom yang terdesentralisasi sehingga semakin adanya desentralisasi, maka tindak korupsi juga akan berkembang seiring berjalannya waktu. Penyebab munculnya tindak korupsi di suatu negara terdiri dari berbagai faktor, diantaranya risiko dan sanksi hukuman bagi pelaku yang tidak cukup berat, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan sistem pemerintahan yang kurang mengikat.

Penelitian ini menggunakan data panel lintas negara berjumlah 85 negara yang tersebar di 5 benua (Asia, Afrika, Eropa, Amerika, serta Australia dan Oseania). Benua Asia berjumlah 21 negara. Benua Afrika berjumlah 11 negara. Benua Eropa berjumlah 38 negara. Benua Amerika berjumlah 11 negara serta yang terakhir Benua Australia dan Oseania berjumlah 4 negara. Penggunaan 85 negara disebabkan, karena telah mewakili dari 5 benua yang ada. Rentang tahun observasi sebanyak 5 tahun, dari tahun 2012 hingga 2016. Tahun observasi sebanyak 5 tahun menjelaskan bahwa data desentralisasi fiskal dan korupsi merupakan data yang terbaru.

Penelitian ini banyak yang perlu dikaji dan dibuktikan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap korupsi di beberapa negara dengan bantuan berbagai jurnal acuan yang sesuai serta variabel pendukung lainnya, seperti *income*. Judul yang digunakan ialah “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Korupsi Tahun 2012-2016”.

## **1.2 Kesenjangan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, kesenjangan penelitian ini adalah adanya temuan penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lain terhadap konsep dan hipotesis yang sama. Konsep dan hipotesis yang sama ialah desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap korupsi.

Temuan penelitian yang berbeda, yakni oleh Lederman, Loayza, dan Soares (2005) menjelaskan bahwa negara yang terdesentralisasi dapat mengurangi korupsi. Penelitian yang telah dilakukan Treisman (2000) ialah korupsi suatu negara meningkat akibat dari desentralisasi fiskal.

Penelitian sebelumnya, termasuk Lederman, Loayza, dan Soares (2005) serta Treisman (2000) menggunakan sampel negara kurang dari 85 negara. Penelitian terbaru yang telah dilakukan Meriem dkk (2016) menggunakan sampel sebanyak 38 negara. Penelitian ini menggunakan 85 negara agar berbeda dengan penelitian sebelumnya.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari adanya desentralisasi fiskal terhadap korupsi di 85 negara tahun 2012-2016.

### **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Data panel ialah gabungan dari data *time series* dan *cross section* yang diuji secara bersama. Mengolah data panel dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Random Effect Model* (REM).

### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Hasil temuan secara langsung maupun tidak langsung, desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap korupsi. Secara langsung, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Treisman (2000), desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap korupsi. Secara tidak langsung, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Lederman, Loayza, dan Soares (2005), desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap korupsi.

### **1.6 Kontribusi Riset**

Penelitian ini menggunakan variabel interaksi antara variabel desentralisasi fiskal dengan pendapatan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap korupsi selain dari indeks kebebasan pers (Lessmann dan Markwardt, 2010).

### **1.7 Uji Ketahanan (*Robustness*)**

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel desentralisasi fiskal ialah total pengeluaran pemerintah daerah dan mendapatkan hasil yang signifikan. Melakukan uji ketahanan (*robustness check*), indikator desentralisasi fiskal yang berbeda diperlukan kemudian diuji kembali dengan metode yang sama. Indikator desentralisasi fiskal yang lain, yaitu menggunakan total belanja pemerintah daerah dan didapatkan hasil yang signifikan pula.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini memiliki struktur pengorganisasian penelitian yang terdiri dari

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas, kesenjangan penelitian, tujuan dari penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, uji ketahanan (*robustness*), dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yang mendukung penelitian, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan hipotesis.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data, populasi dan sampel, model empiris, deskripsi operasional variabel, serta teknik analisis.

#### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum perkembangan variabel penelitian, deskripsi statistik variabel, deskripsi hasil penelitian, melakukan uji asumsi klasik, pembahasan, *robustness check* terhadap metode yang digunakan, serta keterbatasan penelitian.

#### **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan, dan saran bagi pengambil kebijakan maupun saran untuk penelitian ke depannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**